

PERUMBUHAN IKIP PADANG
KOLEKSI DITANG
TITIK DIBINJANG
SUS DEKAMALAH PERUMBUHAN

**KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGADAAN ,
PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

224/HD/87

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG

Oleh

DR. SUTUPTO

Makalah disampaikan dalam Seminar - Lokakarya
Kerjasama Pengembangan Program Kependidikan
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri
Wilayah Indonesia Bagian Barat
1985

TANGGAL	22-11-1984
NOMOR/WARGA	Harah
KORDIS	K1
NO. REGISTRASI	224/HA/87 - ko (2)
KELAS/TAHUN	378.11 sut ko

**KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGADAAN
PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN
TENAGA KEPENDIDIKAN *)**

SUTJIPTO
IKIP PADANG

1. Jumlah murid di semua jenjang dan jenis pendidikan dalam masa Pelita IV ini telah berlipat ganda bila dibandingkan dengan jumlah murid pada Pelita I, II dan III. Pada tahun 1974, misalnya, murid sekolah dasar berjumlah 13,3 juta. Lima tahun kemudian jumlah itu meningkat menjadi 22,4 juta orang dan pada tahun 1984 jumlah itu meningkat menjadi 28,9 juta orang. Pada akhir Pelita IV nanti jumlah tersebut diperkirakan akan menjadi 29,4 juta orang. Ledakan ini juga terjadi pada tingkat SLTP dan SLTA. Pada awal Pelita II jumlah murid SMTP dan SMTA masing-masing adalah 1,7 juta dan 0,7 juta orang. Pada permulaan Pelita III jumlah tersebut masing-masing meningkat menjadi 2,7 juta dan 1,3 juta orang, sedangkan pada akhir Pelita IV nanti jumlah tersebut diperkirakan akan menjadi masing-masing 7,7 juta dan 4,4 juta orang.

*) Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Pengembangan Program Kependidikan BKS PTN-B. Padang tanggal 29 April s.d. 1 Mei 1985 di Padang.

Di samping jumlah murid dalam sekolah formal, anggota masyarakat yang memerlukan pendidikan luar sekolah juga bertambah besar jumlahnya.

2. Peningkatan jumlah murid yang demikian besarnya, menuntut pemenuhan jumlah tenaga kependidikan yang harus diusahakan oleh LPTK. Keadaan ini membawa beberapa konsekuensi dalam pengelolaan LPTK. Pertama, LPTK mau tidak mau harus meningkatkan daya tampungnya secara maksimal ; kedua, berbarengan dengan itu program-program harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mempunyai relevansi dengan kebutuhan di lapangan ; ketiga, efisiensi pengelolaan dalam bentuk produktivitas harus ditingkatkan dan keempat koordinasi dan komunikasi dengan badan-badan di luar LPTK harus pula ditingkatkan dalam usaha memenuhi relevansi kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.
3. Jika kita melihat kebutuhan jumlah tenaga kependidikan tersebut, maka akan kelihatan bahwa jumlah itu sangat besar. Dalam Pelita IV kebutuhan guru SMP, SMA, SMTP Kejuruan, SMTA Kejuruan berjumlah sekitar 260.000 orang. Pemenuhan jumlah yang demikian besarnya itu sudah barang tentu akan mempunyai berbagai konsekuensi. Pertama akan terjadi lompatan penambahan jumlah dalam pengadaan tenaga kependidikan dalam kurun waktu singkat, kedua akan terjadi peningkatan yang tajam

3

dalam volume kegiatan dalam penempatan tenaga tersebut, dan ketiga diperlukan pemikiran dan kegiatan yang berskala besar dalam usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan. Yang terakhir ini memerlukan sumber yang sangat besar, lebih-lebih lagi jika dalam pemenuhan tuntutan akan jumlah tenaga kependidikan nanti faktor mutu akan mengalami gangguan untuk mengejar target kuantitatif.

4. Masalah kualitatif dan kuantitatif tenaga kependidikan seperti yang telah disebutkan dalam butir terdahulu, memerlukan sistem pengelolaan LPTK yang inovatif, efektif dan terpadu baik dalam perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program-programnya. Salah satu usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ini adalah dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi organisasi baik di dalam LPTK sendiri maupun antara LPTK dengan badan-badan lain di luarnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dalam pengadaan, penempatan dan pengembangan karier tenaga kependidikan itu.
5. Usaha peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan LPTK untuk memenuhi kebutuhan sistem pendidikan harus dikelola sedemikian rupa sehingga penggunaan semua sumber harus terarah dan menunjang tujuan pemenuhan kebutuhan yang ingin tercapai itu. LPTK harus pula dikelola

sedemikian rupa sehingga prasyarat ekologis kelembagaan mendukung terciptakannya komitmen semua personal yang terlibat dalam LPTK, baik yang termasuk kategori pelaksana akademik maupun yang termasuk dalam kategori pekerja administratif dalam posisi struktural maupun non-struktural. Sikap keterbukaan harus direalisasikan dalam bentuk-bentuk komunikasi atas-bawah bawah-atas yang efektif. Para pelaksana harus mempunyai akses (access) untuk mendapatkan kemudahan akademik dan administratif yang terdapat dalam LPTK.

6. Dalam melihat koordinasi dan komunikasi dalam LPTK, ada baiknya kita melihat jenis kewenangan yang ada di Perguruan Tinggi termasuk LPTK. Pertama, kewenangan akademik yaitu kewenangan yang dipunyai staf pengajar karena profesinya sebagai tenaga pengajar profesional. Mereka ahli dalam bidangnya baik dalam mengajarkan kepada mahasiswa, melaksanakan pengembangan ilmunya dalam bentuk penelitian serta menyumbangkan keahliannya itu dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Kedua, kewenangan administratif, yaitu kewenangan dalam mengelola sumber-sumber yang ada di lembaga agar tujuan lembaga itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam struktur organisasi perguruan tinggi, sebenarnya kewenangan akademik berada pada tingkat hirarki yang paling bawah, yaitu pada dosen, sedangkan kewenangan

administratif, mempunyai jenjang hirarki sesuai dengan struktur organisasi. Makin tinggi jenjang hirarki tersebut makin besar wewenang administratifnya. Jika batas-batas kewenangan ini tidak diatur dalam suatu mekanisme yang jelas, maka seringkali akan menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas lembaga yang sedang giat-giatnya diusahakan untuk ditingkatkan. Bahkan dapat terjadi keadaan ini akan menurunkan kualitas lulusan. Kalau sampai terjadi intervensi administratif demikian kuatnya sehingga dapat mengorbankan pertimbangan akademik profesional, maka perlu diadakan reuiu administratif yang menyeluruh.

7. Pandangan bahwa sistem pendidikan tenaga kependidikan merupakan suatu sistem dan instrumen nasional, mengharuskan kita melihat pengadaan tenaga kependidikan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan nasional. Dalam hubungan ini perlu juga diingat suatu kenyataan bahwa masukan mahasiswa LPTK sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan hampir seluruhnya, berasal dari daerah atau region yang dekat dengan lokasi LPTK. Dari pengalaman yang ada selama ini diketahui bahwa penempatan lulusan di luar daerah LPTK itu sulit dilaksanakan, lebih-lebih kalau daerah tempat ditugaskan mereka itu termasuk dalam kategori daerah terpencil. Keadaan semacam ini menuntut adanya koordinasi dan komunikasi dengan para -

pemakai awal-awal sejak rekrutmen dilakukan. Hambatan birokratik dalam hal ini memang terasa, paling tidak dengan sistem SIPENMARU sekarang ini kelihatannya tidak mungkin untuk memberikan jatah tertentu kepada daerah yang sangat membutuhkan tenaga kependidikan melalui pemberian jatah rekrutmen.

8. Dalam masalah rekrutmen calon tenaga kependidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, rekrutmen harus dapat menjamin bahwa calon mahasiswa yang diterima sesuai dengan ciri keluaran yang diinginkan. Oleh karena itu pada tingkat nasional perlu diusulkan sistem seleksi masuk LPTK yang memenuhi hal tersebut. Barangkali dengan memanfaatkan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui PMDK hal ini dapat dicapai. Untuk meningkatkan relevansi pengadaan tenaga kependidikan dengan kebutuhan jumlah di lapangan perlu didapatkan angka kebutuhan riil tenaga kependidikan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat regional. Dengan kata lain forum-forum UPR harus dimanfaatkan melalui peningkatan pengelolaan sistem informasi, sehingga informasi kebutuhan itu sah dan terandalkan. Di samping itu daya tampung LPTK setiap tahun tidak hanya perlu dikomunikasikan ke Pusat saja, tetapi juga perlu dikomunikasikan kepada Kantor Wilayah Depdikbud, sehingga koordinasi tidak hanya terjadi di tingkat -

SP/1
Sut
K,
7

Pusat tetapi juga di tingkat daerah. Peranan daerah ini sangat penting karena data tentang jumlah jenis dan jenjang kebutuhan tenaga kependidikan yang merupakan dasar rekrutmen tenaga kependidikan dapat ditetapkan menurut kebutuhan riil dalam region itu.

Kedua, jika memang kebutuhan tenaga sangat mendesak untuk dipenuhi, program S₁ barangkali dapat dikurangi dulu. Konsentrasi rekrutmen lebih baik difokuskan kepada program Diploma. Dalam keadaan demikian koordinasi dan komunikasi antar Pusat dan LPTK perlu lebih diintensifkan, terutama karena menyangkut perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber yang sudah langka baik sumber manusia maupun sumber non manusia.

9. Koordinasi dan komunikasi dalam pendidikan tenaga kependidikan bertujuan agar mutu pendidikan tenaga kependidikan makin lama makin meningkat. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini. Pertama, adalah koordinasi dan komunikasi di dalam LPTK sendiri. Pengelolaan program-program di LPTK, khususnya pengelolaan kurikulum kelihatannya belum terkoordinasikan dengan mantap. Antara berbagai Fakultas atau jurusan masih perlu ditingkatkan kerjasamanya. Kita ambil misalnya program minor, atau pengambilan matakuliah di jurusan lain. Di antara pengelola jurusan atau Fakultas masih ada yang berpendapat bahwa mereka -

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG -

adalah penguasa program yang teritorialnya tidak dapat dimasuki oleh jurusan atau Fakultas lain. Pendapat ini mengakibatkan pemborosan yang luar biasa di LPTK, karena jurusan harus menawarkan matakuliah-matakuliahnya sendiri, meskipun matakuliah itu ditawarkan di jurusan atau Fakultas lain dengan staf pengajar yang lebih kompeten. Jika koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan antar jurusan dengan baik maka, pemborosan sumber yang demikian dapat dihindarkan. Kedua, koordinasi dan komunikasi antar LPTK di region atau dalam hal ini antar BKS PTN-B harus ditingkatkan. Sebenarnya salah satu dari tujuan pengenalan dan penggunaan sistem kredit adalah memberikan fasilitas mobilitas yang lebih baik kepada para mahasiswa. Mahasiswa di satu LPTK seharusnya tidak mengalami kesulitan apabila mereka ingin pindah ke LPTK lain atau mengambil matakuliah di lain LPTK, karena kurikulum yang dipakai di LPTK sudah dibakukan. Namun kenyataannya tidak demikian. Di samping itu perlu dikembangkan pertukaran informasi tentang pelaksanaan program, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di antara LPTK BKS PTN-B. Salah satu contoh dapat dikemukakan pengiriman setiap diktat, silabi, hasil dan program penelitian antara LPTK BKS PTN-B.

10. Balikan dari lapangan merupakan suatu hal sangat penting dalam peningkatan mutu lulusan LPTK. Oleh karena

itu perlu kiranya dikembangkan mekanisme "progress check" program dengan mengikut sertakan lembaga "horizontal" yaitu Kanwil Depdikbud di BKS-B serta lembaga "vertikal" seperti Kepala SMTP, Kepala SMTA, serta alumni. Hal terakhir ini masih sedikit sekali ditangani secara sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini kiranya perlu disebut organisasi profesional tenaga kependidikan sejenis, yang kelihatannya belum dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam sistem pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan.

11. Balikan lain yang sangat penting dalam perbaikan proses pendidikan tenaga kependidikan adalah balikan dari lembaga sendiri berupa hasil penelitian pengembangan yang dilakukan oleh staf pengajar dalam usaha memperbaiki proses belajar-mengajar yang dilakukannya. Kelihatannya penelitian semacam ini belum banyak dilakukan di LPTK. Apabila BKS PTN-B ini mempunyai proyek latihan penelitian semacam ini untuk para staf pengajarnya, hal ini akan membantu dalam peningkatan kemampuan staf pengajar maupun untuk peningkatan proses pengambilan keputusan para eksekutif, karena pengambilan keputusan akan lebih didasarkan kepada penemuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. Koordinasi dan komunikasi dalam pengadaan tenaga kependidikan harus ditujukan kepada pemanfaatan sumber secara maksimal. Pokok pikiran ini membawa kepada pikiran bahwa semua sumber belajar yang ada di lokasi LPTK maupun yang dipunyai oleh BKS PTN-B ini harus dimanfaatkan secara bersama. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara yang efisien dalam pemanfaatan sumber tersebut. Dalam hubungan ini perlu kita pikirkan lebih mendalam pokok pikiran yang dilontarkan oleh Rapat Rektor BKS PTN-B di Bandar Lampung untuk mendirikan Pusat Studi Administrasi Pendidikan untuk BKS PTN-B di IKIP Padang. Pikiran ini akan mendukung pemanfaatan sumber manusia yang ada di IKIP Padang untuk kepentingan BKS PTN-B dan sebagian merupakan kepercayaan Universitas terhadap LPTK. Keuntungan lain dari program semacam ini adalah tenaga yang mampu tidak lagi dianggap sebagai sumber lokal tetapi dimanfaatkan bersama sebagai sumber regional.
13. Koordinasi dan komunikasi dalam penempatan tenaga kependidikan menyangkut sistem di luar LPTK. Usaha koordinasi dan komunikasi dalam penempatan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dengan sangat berhasil melalui forum UPT dan UPR serta UPI. Barangkali yang perlu disebut dalam kesempatan ini adalah pengembangan

informasi tentang tenaga yang akan dan telah dihasilkan oleh BKS PTN-B serta berapa lulusan yang belum diangkat untuk kemudian diinformasikan dalam forum-forum tersebut.

14. Salah satu masalah yang masih dirasakan dalam pengembangan tenaga kependidikan adalah belum terintegrasikannya secara mantap pengembangan karier dalam sistem pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan. Seperti diketahui meskipun usaha penerpaduan pengembangan tenaga kependidikan ini telah dilakukan secara terus menerus, tetapi masih ada yang belum menjadi kenyataan. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain BPG dan PPPG yang dalam pelaksanaannya belum melibatkan LPTK secara terencana, meskipun barangkali tenaga LPTK ada yang terlibat secara individual. Salah satu kemajuan yang diperoleh dalam pengintegrasian pengembangan LPTK ini yang dapat disebut monumental adalah program peningkatan kualitas guru melalui BJJ. Ini merupakan modal yang sangat berharga untuk meneruskan usaha sehingga pengembangan tenaga kependidikan dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam LPTK. Dalam usaha untuk menyumbang terealisasinya ide ini, BKS PTN-B dapat mengusahakan berbagai kegiatan penyegaran, penataran dan pendidikan lanjut dengan menggunakan sumber bersama. Pilot proyek bersama barangkali dapat -

dikembangkan dengan menggunakan fasilitas yang ada baik di LPTK atau di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

15. Tulisan ini merupakan bahan masukan untuk diskusi, oleh karena itu sifatnya belum operasional. Dengan mengkombinasikan pengalaman lapangan yang telah dirumuskan oleh para peserta dalam bentuk format isian, dari seminar ini diharapkan keluar gagasan-gagasan yang dapat dikembangkan sebagai rencana kerjasama LPTK BKS PTN-B dalam pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan.

Air Tawar, 29 April 1985

